

Judul : Kenaikan Biaya Haji Diminta Bertahap
Tanggal : Sabtu, 21 Januari 2023
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

Kenaikan Biaya Haji Diminta Bertahap

JAKARTA – Kenaikan biaya haji memang sulit dihindari di tengah lonjakan berbagai komponen kebutuhan di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Namun, rencana Pemerintah Indonesia untuk membebaskan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) kepada setiap jamaah sebesar Rp69 juta pada musim haji 2023 dinilai terlalu besar dan mendarak.

"Kenaikan biaya haji tahun 2023 yang ditanggung tiap jamaah tidak boleh melampaui angka Rp55 juta. Saya merasa ini batas psikologis kenaikan biaya haji yang ditanggung tiap jamaah. Ke depan, secara bertahap, tiap tahun setoran jamaah dinaikkan untuk mencapai angka ideal 70% banding 30% antara biaya yang ditanggung jamaah dan nilai manfaat (subsidi) dari BPKH," kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Lukman Hakim, Jumat (20/1).

Di sisi lain, Lukman mengakui, jika tak dinaikkan, maka Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan terancam bangkrut. Kenaikan biaya haji diperlukan untuk menjamin subsidi atau nilai manfaat bagi jamaah haji 10 tahun ke depan. "Negara harus memastikan setiap calon jamaah haji yang sudah memberikan setoran awal dan dananya dikelola BPKH dapat berangkat haji pada saatnya nanti. Jika tidak dilakukan kenaikan, tetap Rp39 juta biaya yang ditanggung jamaah, diperkerakan tidak sampai 10 ke depan BPKH akan kolaps alias bangkrut," ujarnya.

Kemendagri telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada musim haji 2023 sebesar Rp98,9 juta. Dari BPIH tersebut, setiap calon jamaah direncanakan akan menanggung biaya sebesar Rp69,2 juta. Sedangkan sisanya atau Rp29,7 juta akan diambilkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Dengan formula seperti itu, berarti 70% biaya haji ditanggung jamaah dan 30% dari nilai manfaat.

Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, kebijakan komponen BPIH ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurutnya, pembebanan Bipih harus sesuai prinsip *istitho'ah* dan likuiditas penyelenggaraan haji di tahun berikutnya.

Yaqut mengatakan, komponen BPIH yang dibayarkan jamaah sebesar Rp69,19 juta terdiri atas biaya penerbangan embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp33,9 juta, akomodasi Madinah Rp5,6 juta, *living cost* Rp4 juta, visa Rp1,2 juta, dan paket layanan *mayan* Rp5,5 juta.

Anggota DPR Komisi VIII dari

Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyatakan menolak kenaikan Bipih hingga Rp69 juta. Menurutnya, kenaikan Bipih senilai itu terlalu tinggi, sementara untuk pelaksanaan hajada dana optimalisasi yang bisa digunakan. "Fraksi PKS tentu tidak secepat dengan usulan pemerintah yang menaikkan Bipih hingga Rp69 juta, yang kalau kemarin sekitar Rp40 juta. Kita akan berjuang agar biaya ditanggung jamaah lebih ringan dan terjangkau," ucapnya.

Kalaupun memang harus naik, menurut Bukhori, besarnya tidak harus sampai Rp69 juta karena sebenarnya dalam beban biaya operasional haji sudah ditambah dari pengelolaan dana haji. "Saya kira kalau naik masih di angka Rp50 jutaan," katanya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) Ustaz Haris Muslim mengakui khawatir banyak calon jamaah haji yang tidak memenuhi *istitho'ah* atau tidak mampu secara ekonomi dengan kenaikan yang cukup signifikan tersebut. Haris menilai, kenaikan Bipih hingga Rp69 juta tentu akan memberatkan calon jamaah haji. Karena, yang mereka lihat dan rasakan adalah lonjakan kenaikan nominal yang harus dibayar dan hampir 100% dari tahun sebelumnya. "Rasionalisasinya akan sulit diterima kalau kita kaitkan dengan nilai inflasi atau nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan perlu diingat tidak semua calon jamaah haji mampu, tapi banyak dari mereka yang untuk berhaji ini menabung dengan susah payah, boleh jadi mereka mengestimasikan anggaran dengan standar tahun-tahun sebelumnya," ungkap Haris.

Haris mengatakan, persoalan biaya haji ini harus jadi perhatian dan pertimbangan. Dengan kenaikan Bipih yang signifikan, dikhawatirkan akan banyak calon jamaah yang gugur

kriteria *istitho'ah*-nya. Di sisi lain, pemerintah harus transparan dalam merasionalisasi biaya haji yang harus dilunasi oleh calon jamaah haji. Menurutnya, perlu edukasi dan literasi yang baik kepada para calon jamaah haji sehingga walaupun terjadi kenaikan di batas yang dapat dipahami dan tidak memberatkan calon jamaah haji. "Harapan kita, Komisi VIII DPR RI bisa mengkaji masalah ini secara seksama dan merekomendasikan keputusan terbaik untuk besaran Bipih yang harus dibayar jamaah pada khususnya dan pelayanan terhadap jamaah," ujar Haris.

Komnas Hajid dan Umrah menilai kenaikan biaya haji 2023 sulit dihindari. Biaya haji mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi demi kelangsungan dan kesehatan keuangan haji. "Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi seperti biaya angkutan udara karena adanya kenaikan juga naik,

PERLU KAJIAN MATANG

Usulan pemerintah agar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 yang ditanggung jamaah haji Indonesia hingga Rp69 juta memicu pro-kontra. Kenaikan ini di satu sisi tidak dapat dihindari karena kenaikan biaya berbagai komponen kebutuhan perjalanan ibadah haji, di satu sisi kenaikan dinilai cukup drastis dari Rp40 jutaan menjadi Rp69 jutaan

Kenaikan biaya haji tahun 2023 yang ditanggung tiap jamaah tidak boleh melampaui angka Rp55 juta. Saya merasa ini batas psikologis kenaikan biaya haji yang ditanggung tiap jamaah.



Lukman Hakim
Anggota Komisi VIII DPR RI/
Fraksi PKB

Fraksi PKS tentu tidak secepat dengan usulan pemerintah yang menaikkan Bipih hingga Rp69 juta, yang kalau kemarin sekitar Rp40 juta. Kita akan berjuang agar biaya ditanggung jamaah lebih ringan dan terjangkau.



Bukhori Yusuf
Anggota Komisi VIII DPR RI/
Fraksi PKS

KORAN SINDO



Rasionalisasinya akan sulit diterima kalau kita kaitkan dengan nilai inflasi atau nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan perlu diingat tidak semua calon jamaah haji mampu, tapi banyak dari mereka yang untuk berhaji ini menabung dengan susah payah, boleh jadi mereka mengestimasikan anggaran dengan standar tahun-tahun sebelumnya.

Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi seperti biaya angkutan udara karena adanya kenaikan juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, akses, dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut.



Ustaz Haris Muslim
Sekum PP Persis



Mustolih Siradj
Ketua Komnas Haji dan Umrah

hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, akses, dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Menurutnya, rancangan biaya yang diusulkan Menag ke Komisi VIII DPR dalam rangka rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan haji sebab selama ini subsidi ke BPIH ditopang dari subsidi dana yang berasal dari imbal hasil kelolaan keuangan haji yang nilainya terlalu besar dan cenderung tidak sehat.

"Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jamaah tunggu berkisar Rp160 triliun. Seharusnya hasil dari penempatan maupun investasi menjadi hak dari jamaah haji tunggu (*waiting list*) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (*subsidy fund*). Tetapi, selama ini tradisinya malah diberikan untuk menyubsidi jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan sampai 100%. Ini memang harus mulai dikoreksi dan diarahkan," pungkas dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini.

nona susarna/
sindonews